



**RENCANA KERJA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana pembangunan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan pembangunan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah menyusun Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 dengan mempedomani Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Disarpusda dalam melaksanakan urusan perpustakaan membantu dalam mewujudkan Misi II Kota Bekasi yaitu : “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan” dengan Tujuan I yaitu “Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis” dengan sasaran “Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata”.

Disarpusda dalam melaksanakan urusan kearsipan membantu dalam mewujudkan Misi V Kota Bekasi yaitu “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren” dengan Tujuan I “Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif” dengan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”.

Selain mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Disarpusda Tahun 2026 juga ikut mendukung pencapaian tema pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026 yaitu **“Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan serta kemantapan perekonomian kota”**. Dengan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026:

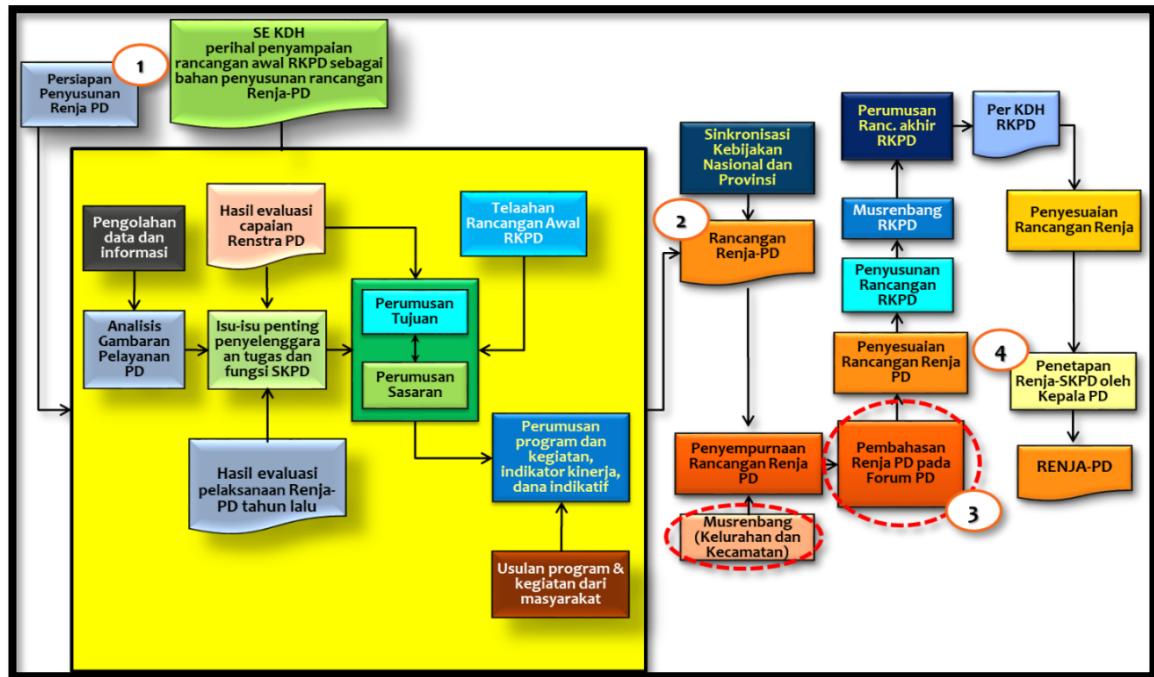
1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital;
2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan
5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha disektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan

Disarpusda dalam aspek perencanaannya memastikan program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 melalui peningkatan kegemaran membaca masyarakat Kota Bekasi serta mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik di Pemerintah Kota Bekasi.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan Renja, Penyusunan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Disarpusda, adalah sebagai berikut:

- Berpedoman pada Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2026;
- Rumusan program/kegiatan di dalam Renja ini didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- Penyusunan Renja ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$

Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan pendekatan kinerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 (RKA) yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- q. Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi;
- r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

- t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- u. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman resmi Disarpusda Kota Bekasi dalam menyusun Rencana kerja tahunan dan sekaligus penentuan program kegiatan bidang Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi Tahun 2026.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana kerja Disarpusda Kota Bekasi tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan;
3. Menjabarkan gambaran umum tentang program perpustakaan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi;
4. Memudahkan penilaian dari hasil program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Disarpusda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Disarpusda, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Disarpusda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Disarpusda Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Disarpusda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA DISARPUSDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disarpusda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disarpusda

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disarpusda tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Disarpusda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Disarpusda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disarpusda

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disarpusda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disarpusda

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Disarpusda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disarpusda, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Disarpusda, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada Disarpusda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Disarpusda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disarpusda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Pada bagian ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disarpusda yang mempedomani Renstra Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Disarpusda, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISARPUSDA

Pada bagian ini berisikan Tabel rencana program dan kegiatan Disarpusda Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISARPUSDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi Renja Disarpusda tahun 2024 (n-2) dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Disarpusda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disarpusda tahun lalu dan capaian Renstra Disarpusda diperoleh dari capaian kinerja Renja Disarpusda Tahun 2024 (tahun n-2) adalah sebagai berikut.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disarpusda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disarpusda

Pada tahun 2024, Disarpusda Kota Bekasi memiliki tiga sasaran yang harus diwujudkan yaitu: (1) Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan Perangkat Daerah; (2) Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi; dan (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024 melaksanakan 4 Program dengan 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan baik yang termasuk Belanja Langsung Urusan (BLU) maupun Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan anggaran yang sebesar Rp 17.356.146.185,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.137.459.792,- capaian penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 52.65%.

Hasil evaluasi program dan kegiatan Disarpusda tahun 2024 secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disarpusda Kota Bekasi dan Pencapaian Renstra Disarpusda Kota Bekasi Sampai Dengan Tahun 2024

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100 %	17.356.146.185,00	2,08	1.998.791.661,00	21,44	4.131.200.850,00	13,97	3.007.467.281,00	59,39	-9.137.459.792,00	96,88	0,00	96,88	0,00	96,88	0,00				
2.23		Perpustakaan						100 %	1.465.519.000,00	0,00	0,00	26,75	168.463.940,00	12,82	321.717.605,00	47,93	-13.735.066.309,00	87,50	-13.244.884.764,00	87,50	-903,77	87,50	-13.244.884.764,00				
2.23.2	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Aktif	10,00 %	1.380.000.000,00	0,00 %	0,00	10,00 %	1.465.519.000,00	0,00	0,00	26,75	168.463.940,00	12,82	321.717.605,00	47,93	421.604.000,00	87,50	911.785.545,00	8,75	62,22	87,50	911.785.545,00	87,50	66,07		
2.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota					100 %	915.353.000,00	0,00	0,00	34,23	149.758.940,00	20,51	224.604.605,00	45,26	246.339.000,00	100,00	620.702.545,00	100,00	67,81	100,00	620.702.545,00	100,00	44,98		
2.2.01.1		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (TSM : Information Technology Service Management)					1,00 Layanan	112.076.000,00	0,00	0,00	1,00	77.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	77.400.000,00	100,00	69,06	1,00	77.400.000,00	1,00	0,06	Dinas Ansp Dan Perpustakaan Daerah	
2.2.01.2		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					57,00 Perpustakaan	157.015.000,00	0,00	0,00	32,00	66.983.440,00	10,00	27.000.000,00	15,00	27.525.000,00	57,00	121.508.440,00	100,00	77,39	57,00	121.508.440,00	57,00	0,09	Dinas Ansp Dan Perpustakaan Daerah	
2.2.01.4		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					250,00 Perpustakaan	201.432.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375.500,00	0,00	0,00	250,00	119.383.000,00	250,00	124.758.500,00	100,00	61,94	250,00	124.758.500,00	250,00	0,09	Dinas Ansp Dan Perpustakaan Daerah	
2.2.01.9		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					2.000,00 Eksemplar	340.160.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	192.717.605,00	0,00	0,00	2.000,00	192.717.605,00	100,00	56,65	2.000,00	192.717.605,00	2.000,00	0,14	Dinas Ansp Dan Perpustakaan Daerah	

2.2.01.10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,00 Dokumen	104.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887.000,00	2,00	99.431.000,00	2,00	104.318.000,00	100,00	99,66	2,00	104.318.000,00	2,00	0,08	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah													
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	67,81	100,00	620.702.545,00	100,00	44,98														
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi																			
2.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota					100 %	550.166.000,00	0,00	0,00	14,29	18.705.000,00	0,00	97.113.000,00	52,38	175.265.000,00	66,67	291.083.000,00	66,67	52,91	66,67	291.083.000,00	66,67	21,09														
2.2.02.1		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					7,00 Lokus	200.000.000,00	0,00	0,00	3,00	11.145.000,00	0,00	10.993.000,00	4,00	162.223.000,00	7,00	184.361.000,00	100,00	92,18	7,00	184.361.000,00	7,00	0,13	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah													
2.2.02.2		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					2,00 Perpustakaan	286.816.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	0,00	36.620.000,00	0,00	0,00	0,00	44.180.000,00	0,00	15,40	0,00	44.180.000,00	0,00	0,03	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	Pengerjaan Perpustakaan mini yang lokasinya sudah ditentukan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan terjadi kesalahan kode rekening												
2.2.02.5		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya					2,00 Orang	63.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	2,00	13.042.000,00	2,00	62.542.000,00	100,00	98,72	2,00	62.542.000,00	2,00	0,05	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah													
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				66,67	52,91	66,67	291.083.000,00	66,67	21,09														
Predikat kinerja Kegiatan																				Sedang																			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				87,50	62,22	87,50	911.785.545,00	87,50	66,07														
Predikat kinerja Program																				Tinggi																			
2.24		Kearsipan						100 %	15.890.627.185,00	2,78	1.998.791.661,00	19,67	3.962.736.910,00	14,35	2.685.749.676,00	63,20	4.597.606.517,00	100,00	13.244.884.764,00	100,00	83,35	100,00	13.244.884.764,00																
2.24.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	2.879.950.000.000,00	87,76 %	13.416.236.981,00	100,00 %	14.542.433.185,00	3,92	1.998.791.661,00	27,77	3.909.576.910,00	8,84	2.526.730.176,00	59,46	3.684.616.667,00	100,00	12.119.715.414,00	100,00	83,34	100,00	12.119.715.414,00	100,00	0,42														
1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	100,00	0,00														
1.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6,00 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.000.000,00	6,00	3.000.000,00	100,00	100,00	6,00	3.000.000,00	6,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah													
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	100,00	0,00														
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi																			

1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Keuangan Perangkat Daerah					100 %	12.167.752.000,00	12,50	1.832.154.645,00	25,00	3.340.509.215,00	25,00	2.180.027.592,00	37,50	2.733.304.929,00	100,00	10.085.996.381,00	100,00	82,89	100,00	10.085.996.381,00	100,00	0,35		
1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					60,00 Orang/bulan	12.164.752.000,00	15,00	1.832.154.645,00	15,00	3.340.509.215,00	15,00	2.180.027.592,00	15,00	2.730.305.929,00	60,00	10.082.997.381,00	100,00	82,89	60,00	10.082.997.381,00	60,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20,00 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	10,00	2.999.000,00	20,00	2.999.000,00	100,00	99,97	20,00	2.999.000,00	20,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	82,89	100,00	10.085.996.381,00	100,00	0,35		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75.443.500,00	100,00	75.443.500,00	100,00	62,87	100,00	75.443.500,00	100,00	0,00		
1.2.05.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10,00 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	75.443.500,00	10,00	75.443.500,00	100,00	62,87	10,00	75.443.500,00	10,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	62,87	100,00	75.443.500,00	100,00	0,00		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %	372.920.000,00	0,00	0,00	34,52	162.661.800,00	4,76	42.514.000,00	60,71	132.070.900,00	100,00	337.246.700,00	100,00	90,43	100,00	337.246.700,00	100,00	0,01		
1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.675.400,00	1,00	9.675.400,00	100,00	96,75	1,00	9.675.400,00	1,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6,00 Paket	139.820.000,00	0,00	0,00	2,00	114.773.300,00	2,00	0,00	2,00	20.805.000,00	6,00	135.578.300,00	100,00	96,97	6,00	135.578.300,00	6,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3,00 Paket	48.320.000,00	0,00	0,00	2,00	18.400.000,00	0,00	0,00	1,00	8.921.000,00	3,00	27.321.000,00	100,00	56,54	3,00	27.321.000,00	3,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12,00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	5,00	7.485.000,00	0,00	0,00	7,00	22.515.000,00	12,00	30.000.000,00	100,00	100,00	12,00	30.000.000,00	12,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.06.8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					5,00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	2,00	1.040.000,00	0,00	3.600.000,00	3,00	3.654.000,00	5,00	8.294.000,00	100,00	55,29	5,00	8.294.000,00	5,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5,00 Laporan	124.780.000,00	0,00	0,00	3,00	20.963.500,00	0,00	38.914.000,00	2,00	61.800.500,00	5,00	121.678.000,00	100,00	97,51	5,00	121.678.000,00	5,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
1.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10,00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.700.000,00	10,00	4.700.000,00	100,00	94,00	10,00	4.700.000,00	10,00	0,00	Dinas Ansip Dan Perpustakaan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	90,43	100,00	337.246.700,00	100,00	0,01		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							

1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	1.343.765.185,00	20,83	166.637.016,00	33,33	310.959.895,00	20,83	272.470.684,00	25,00	381.831.118,00	100,00	1.131.898.713,00	100,00	84,23	100,00	1.131.898.713,00	100,00	0,04		
1.2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12,00 Laporan	300.000.000,00	2,00	0,00	5,00	72.671.690,00	2,00	37.347.885,00	3,00	39.324.484,00	12,00	149.344.059,00	100,00	49,78	12,00	149.344.059,00	12,00	0,00	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12,00 Laporan	1.043.765.185,00	3,00	166.637.016,00	3,00	238.288.205,00	3,00	235.122.799,00	3,00	342.506.634,00	12,00	982.554.654,00	100,00	94,14	12,00	982.554.654,00	12,00	0,00	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	84,23	100,00	1.131.898.713,00	100,00	0,04		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aktivitas Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100 %	534.996.000,00	0,00	0,00	15,94	95.446.000,00	6,34	31.717.900,00	77,72	358.966.220,00	100,00	486.130.120,00	100,00	90,87	100,00	486.130.120,00	100,00	0,02		
1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6,00 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	2,00	42.366.000,00	1,00	18.769.200,00	3,00	62.121.160,00	6,00	123.256.360,00	100,00	91,30	6,00	123.256.360,00	6,00	0,00	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
1.2.09.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan					23,00 Unit	209.996.000,00	0,00	0,00	7,00	53.080.000,00	2,00	12.948.700,00	14,00	107.925.360,00	23,00	173.954.060,00	100,00	82,84	23,00	173.954.060,00	23,00	0,00	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					40,00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	39.325.000,00	40,00	39.325.000,00	100,00	98,31	40,00	39.325.000,00	40,00	0,00	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
1.2.09.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi					1,00 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	149.594.700,00	1,00	149.594.700,00	100,00	99,73	1,00	149.594.700,00	1,00	0,00	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				100,00	90,87	100,00	486.130.120,00	100,00	0,02		
Predikat kinerja Kegiatan																				Sangat Tinggi							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				100,00	83,34	100,00	12.119.715.414,00	100,00	0,42		
Predikat kinerja Program																				Sangat Tinggi							
2.24.2	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Program Pengelolaan Ansjp	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Ansjp Secara Tertib	70,00 %	980.000.000,00	98,67 %	1.426.729.505,00	70,00 %	1.120.686.000,00	0,00	0,00	0,00	53.160.000,00	32,33	159.019.500,00	67,67	782.324.350,00	100,00	994.503.850,00	70,00	88,74	100,00	994.503.850,00	100,00	101,48		
2.2.01		Pengelolaan Ansjp Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kegiatan Pengelolaan Ansjp Dinamis					100 %	532.490.000,00	0,00	0,00	0,00	53.160.000,00	31,33	75.491.500,00	68,67	331.267.900,00	100,00	459.919.400,00	100,00	86,37	100,00	459.919.400,00	100,00	46,93		
2.2.01.1		Penciptaan dan Penggunaan Ansjp Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					25,00 Berkas	179.035.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	11,00	66.665.000,00	14,00	52.725.000,00	25,00	133.190.000,00	100,00	74,39	25,00	133.190.000,00	25,00	0,14	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	
2.2.01.2		Pemeliharaan dan Penyusutan Ansjp Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					1,00 berkas	263.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	255.966.000,00	1,00	255.966.000,00	100,00	97,16	1,00	255.966.000,00	1,00	0,26	Dinas Ansjp Dan Perputakaan Daerah	

2.2.01.3		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					2,00	Laporan	90.015.000,00	0,00	0,00	0,00	39.360.000,00	1,00	8.826.500,00	1,00	22.576.900,00	2,00	70.763.400,00	100,00	78,61	2,00	70.763.400,00	2,00	0,07	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					100,00	86,37	100,00	459.919.400,00	100,00	46,93										
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi															
2.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis					100 %	469.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	419.648.200,00	100,00	419.648.200,00	100,00	89,46	100,00	419.648.200,00	100,00	42,82										
2.2.02.2		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					14,00	Arsip	469.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	419.648.200,00	14,00	419.648.200,00	100,00	89,46	14,00	419.648.200,00	14,00	0,43	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					100,00	89,46	100,00	419.648.200,00	100,00	42,82										
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi															
2.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan					100 %	119.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	83.528.000,00	50,00	31.408.250,00	100,00	114.936.250,00	100,00	96,51	100,00	114.936.250,00	100,00	11,73											
2.2.03.1		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					1,00	Pengguna	87.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83.528.000,00	0,00	0,00	1,00	83.528.000,00	100,00	95,59	1,00	83.528.000,00	1,00	0,09	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah									
2.2.03.2		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					2,00	Laporan	31.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	31.408.250,00	2,00	31.408.250,00	100,00	99,05	2,00	31.408.250,00	2,00	0,03	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					100,00	96,51	100,00	114.936.250,00	100,00	11,73										
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi															
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					100,00	88,74	100,00	994.503.850,00	100,00	101,48										
Predikat kinerja Program																					Sangat Tinggi															
2.24.3		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		0,00	0,00	100,00 %	202.925.425,00	0,00	227.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130.665.500,00	100,00	130.665.500,00	1,00	57,43	100,00	130.665.500,00	100,00	13.066.550.000,00										
3.2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						100 %	227.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130.665.500,00	100,00	130.665.500,00	100,00	57,43	100,00	130.665.500,00	100,00	13.066.550.000,00										
3.2.01.1		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun					2.500,00	Arsip	227.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	130.665.500,00	2.500,00	130.665.500,00	100,00	57,43	2.500,00	130.665.500,00	2.500,00	130.665.500,00	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah									
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																					100,00	57,43	100,00	130.665.500,00	100,00	13.066.550.000,00										
Predikat kinerja Kegiatan																					Sangat Tinggi															
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					100,00	57,43	100,00	130.665.500,00	100,00	13.066.550.000,00										
Predikat kinerja Program																					Sangat Tinggi															

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan dan Indikator Kinerja Utama (IKU Disarpusda hingga tahun 2024 seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

NO	SASARAN	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA Disarpusda			REALISASI CAPAIAN 2024	PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026		2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	82.8	80	81	
			2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	80	80.5	81	55.01	80	80.5	
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan		3. Indeks Pengawasan Kearsipan	62	63	64	83.29	62	63	
3	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi		4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60	63	66	62.59	63	66	

Indikator kinerja sasaran merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disarpusda yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat

Indikator Kinerja I : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Sasaran ini mendukung tujuan peningkatan budaya baca masyarakat dan peningkatan akses terhadap sumber informasi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang mencerminkan capaian dalam aspek akses, keterlibatan, dan hasil pembelajaran berbasis literasi di tingkat Kota Bekasi.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berbagai data hasil penelitian umumnya masih menunjukkan bahwa minat dan kebiasaan masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Rendahnya minat dan kebiasaan membaca tersebut dapat dipengaruhi pada beberapa faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana membaca, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan wakil rakyat, serta berbagai faktor lainnya.

IPLM merupakan pengukuran nilai indeks yang digunakan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan bidang perpustakaan, serta digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik

pada aspek koleksi, tenaga pengelola, sarana dan prasarana, hingga pelayanan pada pemustaka dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi di perpustakaan. Ketersediaan dan penyelenggaraan perpustakaan diyakini mampu berkontribusi pada upaya pembangunan literasi masyarakatnya.

Salah satu tujuan pengukuran IPLM adalah diperolehnya dukungan pemerataan dan pengembangan sarana/prasarana infrastruktur serta peningkatan strategi layanan perpustakaan, karena itu tinggi rendahnya kategori IPLM yang dicapai oleh setiap daerah dapat menjadi dasar/acuan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu layanan perpustakaan di daerah masing-masing. Strategi pengembangan perpustakaan dapat disesuaikan dengan jenisnya yang mengacu pada standar nasional perpustakaan.

Dengan terbangunnya infrastruktur perpustakaan serta unsur-unsur pembangun literasi di perpustakaan seperti pustakawan dan tenaga perpustakaan, koleksi, kunjungan pemustaka, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi maupun kegiatan literasi masyarakat. Pembangunan pada setiap unsur tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan literasi masyarakat di seluruh Indonesia, melalui pemerataan pembangunan dan pengembangan perpustakaan.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator Kinerja Utama : Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip

Sasaran ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola arsip secara menyeluruh, baik arsip dinamis maupun statis, serta mempercepat proses digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kearsipan yang bermutu tinggi akan mendukung efektivitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin keberlanjutan memori kelembagaan dan pembangunan daerah. Indikator sasaran ini adalah Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip, yang mengukur sejauh mana arsip dikelola secara elektronik, terintegrasi,

dan mudah diakses untuk mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Tingkat digitalisasi arsip merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan tata kelola kearsipan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi arsip tidak hanya berfungsi sebagai bentuk alih media dari arsip fisik ke dalam bentuk digital, namun juga mencerminkan transformasi sistem pengelolaan arsip menuju sistem informasi kearsipan elektronik yang terintegrasi.

Secara regulatif, pengelolaan arsip secara elektronik telah diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Elektronik (PADE). Dalam regulasi tersebut, digitalisasi arsip dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

Tingkat digitalisasi arsip diukur melalui beberapa aspek, antara lain:

Persentase arsip yang telah dialihmediakan ke bentuk digital dibandingkan dengan total arsip fisik yang dikuasai oleh Perangkat Daerah;

Ketersediaan dan penggunaan sistem informasi kearsipan elektronik (SIKD/e-Arsip) yang memungkinkan pengelolaan arsip secara sistematis dan terdokumentasi;

Kepatuhan terhadap standar metadata dan format digital yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), seperti penggunaan format PDF/A, TIFF, dan XML;

Tingkat keamanan dan keberlanjutan data digital, termasuk sistem backup, enkripsi, dan kemampuan pemulihan data bila terjadi gangguan (disaster recovery plan);

Kemudahan akses dan temu kembali arsip elektronik, baik untuk internal instansi maupun bagi masyarakat melalui layanan informasi publik.

Penerapan digitalisasi arsip juga sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi, di mana tata kelola informasi yang baik mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, digitalisasi arsip turut mendukung agenda pemerintahan

berbasis elektronik (SPBE) dan transformasi menuju Kota Bekasi Cerdas (Smart City).

Dengan demikian, pencapaian tingkat digitalisasi arsip yang tinggi menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang modern dan andal, serta menjadi elemen kunci dalam pencapaian tujuan strategis Disarpusda, yaitu meningkatnya mutu pengelolaan arsip daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disarpusda

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi terdapat berbagai masalah yang dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan pembangunan urusan perpustakaan dan kearsipan seperti sebagai berikut:

A. PENUNJANG URUSAN

1. Layanan yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat
2. Kurangnya jumlah dan kualitas aparatur Disarpusda dapat mempengaruhi kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.
3. Gedung depot arsip dan gedung layanan perpustakaan kondisinya belum representatif sehingga mengganggu kinerja dan layanan Disarpusda.

B. URUSAN KEARSIPAN

I. Aspek Pengelolaan Arsip.

1. Belum optimalnya registrasi arsip yang lengkap, rapi dan jelas;
2. Belum optimalnya pemberkasan yang menggunakan sistem pemberkasan yang konsisten, lengkap dan rapih;
3. Belum optimalnya penyimpanan dan pemeliharaan yang bersih, rapih, benar dan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Belum optimalnya akses/penggunaan kearsipan yang efisien dan efektif.

II. Aspek Pendukung.

1. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam kualifikasi bidang kearsipan, tidak adanya penunjukkan tugas pengelola kearsipan/arsiparis, disiplin pengelolaan kearsipan dan kreatifitas;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung seperti filling kabinet, rak arsip, boks arsip dan Record

Centre/tempat arsip sebagai tempat penyimpanan arsip dengan minimal ruangan 16 m².

C. URUSAN PERPUSTAKAAN

A. ISU INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. Dibutuhkan pembinaan dan pengembangan SDM bidang Perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan maupun seminar, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional Pustakawan. Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), peran sosial (*social role*), citra diri (*self-image*), perilaku (*behave*), dan motivasi (*motive*) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (*knowledge*) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan dan penyelenggaraan perpustakaan.
2. Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis. Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara *stake holder* perpustakaan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan layanan perpustakaan perlu dilakukan program-program pembangunan lebih terpadu dan terintegrasi.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan mampu berperan sebagai lembaga dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bekasi. Namun di sisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor.

B. ISU EKSTERNAL

1. Rendahnya Pemanfaatan Perpustakaan disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, perpustakaan perlu mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital

serta mengembangkan layanan dari onsite ke layanan online. Keberadaan database perpustakaan sangat tepat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga, belum bisa diakses oleh khalayak umum. Sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung system informasi lainnya. Oleh karena itu, diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan guna teknologi informasi perpustakaan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut isu penting yang dihadapi Disarpusda Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- A. Program penunjang urusan di pemerintah daerah mencakup berbagai aktivitas dan inisiatif yang mendukung fungsi utama pemerintahan, seperti perencanaan, pengawasan, dan layanan publik. Isu strategis yang sering dihadapi dalam program penunjang ini meliputi:
1. Koordinasi Antar-Dinas: Memastikan bahwa berbagai dinas dan lembaga pemerintah daerah dapat berkoordinasi secara efektif untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.
 2. Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM di berbagai unit, termasuk pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
 3. Kekurangan Personel: Mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang berkualitas dan memastikan distribusi SDM yang merata di seluruh unit dan program.
 4. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 5. Laporan dan Akuntabilitas: Menyusun laporan yang transparan tentang penggunaan anggaran, hasil program, dan pencapaian target, serta memastikan akuntabilitas kepada publik dan pemangku kepentingan.

6. Partisipasi Publik: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penunjang untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat dipenuhi.
7. Mengembangkan rencana jangka panjang yang mencakup visi, misi, dan strategi untuk program penunjang, serta menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan.
8. Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi berkala terhadap rencana strategis dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tetap relevan dan efektif.

Mengatasi isu-isu strategis ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, serta komitmen dari seluruh elemen Disarpusda untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program penunjang.

B. Isu strategis urusan kearsipan di pemerintah daerah merupakan aspek penting yang mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut beberapa isu strategis yang sering dihadapi dalam urusan kearsipan:

- 1) Digitalisasi Arsip: Peralihan dari sistem arsip tradisional berbasis kertas ke sistem digital memerlukan investasi besar dalam teknologi dan pelatihan. Hal ini termasuk pengembangan sistem manajemen arsip elektronik, digitalisasi dokumen, dan perlindungan data.
- 2) Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip: Pengelolaan arsip yang baik memerlukan fasilitas penyimpanan yang memadai dan prosedur pemeliharaan yang benar. Arsip harus dilindungi dari kerusakan fisik dan bencana seperti kebakaran atau banjir.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan keahlian sering menjadi kendala dalam pengelolaan arsip. Pemerintah daerah mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk memadai sistem arsip yang efektif dan efisien.
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM: Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan arsip sering kali menjadi tantangan. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan aparaturnya dapat mengelola arsip dengan benar.

- 5) Keamanan dan Kerahasiaan Data: Melindungi kerahasiaan informasi yang terkandung dalam arsip dari akses yang tidak sah adalah penting, terutama untuk dokumen yang sensitif atau pribadi. Ini memerlukan sistem keamanan yang kuat baik dalam bentuk fisik maupun digital.
- 6) Penerapan Regulasi dan Standar: Kepatuhan terhadap regulasi dan standar nasional atau internasional dalam pengelolaan arsip perlu diperhatikan. Hal ini termasuk pemenuhan standar untuk pengelolaan arsip elektronik dan fisik serta prosedur dokumentasi yang sesuai.
- 7) Aksesibilitas dan Transparansi: Menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap arsip yang relevan untuk publik atau pihak berwenang dapat mendukung akuntabilitas dan pelayanan publik. Namun, ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap data sensitif.
- 8) Penyusunan Kebijakan dan Strategi: Pengembangan dan penerapan kebijakan serta strategi pengelolaan arsip yang jelas dan komprehensif penting untuk memastikan pengelolaan arsip yang konsisten dan sesuai standar.
- 9) Perubahan Teknologi dan Metode: Perubahan cepat dalam teknologi dan metode pengelolaan arsip memerlukan adaptasi terus-menerus. Kota Bekasi harus mampu mengikuti perkembangan ini untuk memastikan sistem arsip tetap relevan dan efektif.
- 10) Pemulihan Bencana dan Kontinjensi: Menyusun rencana pemulihan bencana dan kontinjensi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan arsip dalam situasi darurat atau bencana.

Mengatasi isu-isu ini memerlukan pendekatan yang terencana dan komprehensif, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah.

- C. Isu strategis dalam urusan perpustakaan di pemerintah daerah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan perpustakaan untuk mendukung literasi, pendidikan, dan informasi publik. Berikut adalah beberapa isu strategis yang sering dihadapi:

- 1) Digitalisasi dan Teknologi: Adopsi teknologi terbaru dalam perpustakaan, termasuk digitalisasi koleksi, sistem manajemen perpustakaan, dan akses online, memerlukan investasi yang signifikan dan pelatihan staf. Transformasi digital bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, tetapi juga memerlukan strategi untuk mengatasi tantangan teknis dan biaya.
- 2) Ketersediaan dan Pemeliharaan Koleksi: Menyediakan koleksi buku, jurnal, dan materi lainnya yang relevan dan berkualitas memerlukan pengelolaan yang baik. Hal ini termasuk pembelian, penggantian, dan pemeliharaan koleksi agar tetap up-to-date dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kualitas layanan perpustakaan sangat bergantung pada keterampilan dan kompetensi staf. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan lainnya adalah kunci untuk meningkatkan layanan dan manajemen perpustakaan.
- 4) Anggaran dan Sumber Daya: Pembiayaan untuk perpustakaan seringkali menjadi masalah. Penganggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan perpustakaan untuk menyediakan layanan yang memadai, memperbarui koleksi, atau mengadopsi teknologi baru. Perlu adanya alokasi anggaran yang memadai serta upaya untuk mendapatkan dana tambahan melalui hibah atau kerjasama.
- 5) Akses dan Keadilan: Memastikan bahwa perpustakaan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terlayani seperti masyarakat di daerah terpencil atau kelompok dengan kebutuhan khusus, adalah isu strategis penting. Perpustakaan harus berfungsi sebagai tempat yang inklusif dan ramah bagi semua orang.
- 6) Promosi dan Pengembangan Layanan: Mengembangkan program dan layanan yang menarik serta relevan bagi masyarakat merupakan bagian penting dari tugas perpustakaan. Ini termasuk kegiatan seperti program literasi, pelatihan keterampilan, dan acara komunitas. Promosi aktif tentang manfaat dan layanan perpustakaan juga penting untuk menarik pengunjung.
- 7) Kebijakan dan Regulasi: Penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung operasional perpustakaan, termasuk hak cipta, akses

informasi, dan perlindungan data, harus dikelola dengan baik. Perubahan regulasi bisa mempengaruhi cara perpustakaan beroperasi dan memberikan layanan.

- 8) Keterlibatan Komunitas dan Kemitraan: Membangun kemitraan dengan organisasi lokal, sekolah, dan institusi lainnya dapat memperluas jangkauan dan dampak perpustakaan. Keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program perpustakaan juga penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 9) Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas: Memastikan bahwa fasilitas perpustakaan memadai dan nyaman untuk digunakan oleh pengunjung merupakan hal penting. Ini termasuk perencanaan ruang, perawatan bangunan, dan penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan perpustakaan.
- 10) Penyusunan Strategi Jangka Panjang: Perpustakaan perlu memiliki strategi jangka panjang yang mencakup visi, misi, dan rencana aksi untuk pengembangan dan peningkatan layanan. Strategi ini harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Mengatasi isu-isu ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, komunitas, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk menciptakan perpustakaan yang efektif dan berkelanjutan.

2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap RKPD yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program/kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD.

Hasil review RKPD Tahun 2026 terkait Disarpusda adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 telah sesuai dengan kebutuhan Disarpusda untuk Tahun Anggaran 2026, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4.1
Review terhadap RKPD Kota Bekasi Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	Rp.15.067.149.990	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	Rp.15.067.149.990	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		6 Dokumen	Rp.165.000.000,-	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		6 Dokumen	Rp.165.000.000,-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	Rp.150.000,000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	Rp.150.000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	Rp.15.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	Rp.15.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		6 Laporan	Rp.12.299.203.000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		6 Laporan	Rp.12.299.203.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1232 orang/bulan	Rp12.274.203.000,-	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1232 orang/bulan	Rp12.274.203.000,-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp.5.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp.5.000.000	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	Rp.5.000.000,-		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	Rp.5.000.000,-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		15 Laporan	Rp.15.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		15 Laporan	Rp.15.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian		1 Laporan	Rp.125.000.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian		1 Laporan	Rp.125.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK						perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK				
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 Orang	Rp.125.000.000	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25 Orang	Rp.125.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		8 Laporan	Rp.665.000.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		8 Laporan	Rp.665.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp.40.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp.40.000.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp30,000,000	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp30,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	Rp250.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	Rp250.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp.50,000,000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp.50,000,000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	Rp.30,000,000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	Rp.30,000,000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		3 Laporan	Rp.15.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		3 Laporan	Rp.15.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp.200,000,000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp.200,000,000	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10 Dokumen	Rp.30,000,000	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		10 Dokumen	Rp.30,000,000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan		1 Laporan	Rp.350.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan		1 Laporan	Rp.350.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	Rp. 350.000.000	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	Rp. 350.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun sesuai NSPK		4 Laporan	Rp.762.946.990	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun sesuai NSPK		4 Laporan	Rp.762.946.990	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp284,000,000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp284,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp478.946.990	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp478.946.990	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara		4 Laporan	Rp.700.000.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara		4 Laporan	Rp.700.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	Rp.230.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	Rp.230.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	Rp200.000.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	Rp200.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		164 Unit	Rp120.000.000	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		164 Unit	Rp120.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	Rp.150.000,000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	Rp.150.000,000	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Penambahan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Kota Bekasi	10%	1.920.098.000	1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Penambahan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Kota Bekasi	10	1.920.098.000	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pemerataan layanan perpustakaan	Kota Bekasi	739 Perpustakaan	Rp.1.091.354.000,-	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pemerataan layanan perpustakaan	Kota Bekasi	739 Perpustakaan	Rp.1.091.354.000,-	
1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		5 Perpustakaan	Rp150.000,000	1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		5 Perpustakaan	Rp150.000,000	
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah		1 Perpustakaan	Rp100.000.000	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota		1 Perpustakaan	Rp100.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya						Sesuai Kewenangannya				
3	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibangun sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		1 Perpustakaan	Rp70.000.000		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibangun sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		1 Perpustakaan	Rp70.000.000	
4	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat		6000 eksemplar	Rp101.714.000		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat		6000 eksemplar	Rp101.714.000	
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota		70 Orang	Rp.150.000.000	3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota		70 Orang	Rp.150.000.000	
6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		2 Dokumen	Rp.200.000.000	4	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		2 Dokumen	Rp.200.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		1707 eksemplar	Rp170.100,000	5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		1707 eksemplar	Rp170.100,000	
8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kota Bekasi	1 Perpustakaan	Rp149.540.000	6	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kota Bekasi	1 Perpustakaan	Rp149.540.000	
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan Masyarakat rata-rata perhari	Kota Bekasi	1645 orang	Rp. 828.744.000	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan Masyarakat rata-rata perhari	Kota Bekasi	1645 orang	Rp. 828.744.000	
1	Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		14 Orang	Rp.200.000.000,-		Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		14 Orang	Rp.200.000.000,-	
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan berbasis inklusi	Kota Bekasi	2 Perpustakaan	Rp.150.000.000	1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kota Bekasi	2 Perpustakaan	Rp.150.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan						di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan				
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Perpustakaan	Rp.278.744.000	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	3 Perpustakaan	Rp.278.744.000	
4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		3 Lokus	Rp.200.000.000	3	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		3 Lokus	Rp.200.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	Kota Bekasi	45.45%	Rp.900.000.000	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	Kota Bekasi	45.45%	Rp.900.000.000	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Nilai pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah pada audit sistem kearsipan internal	Kota Bekasi	36.94 Nilai	Rp.500.000.000,-	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Nilai pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah pada audit sistem kearsipan internal	Kota Bekasi	36.94 Nilai	Rp.500.000.000,-	
1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp150.000.000	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp.150.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan sadar tertib arsip		12 Lembaga	Rp.250.000.000							
3	Pembinaan kearsipan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, Ormas/orpol kab/kota dan LKD kab/kota telah mengimplemantasi pengelolaan arsip dinamis		44 Instansi	Rp.100.000.000	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		750 Berkas	Rp.240.773.000	
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai pada aspek pengelolaan arsip statis pada audit system kearsipan internal	Kota Bekasi	24.88 nilai	Rp.100.000.000	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai pada aspek pengelolaan arsip statis pada audit system kearsipan internal	Kota Bekasi	24.88 nilai	Rp.100.000.000	
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		50 arsip	Rp.100.000.000	1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		50 arsip	Rp.100.000.000	
3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat digitalisasi arsip pada audit system kearsipan internal		93.02	Rp.300.000.000,-	3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat digitalisasi arsip pada audit system kearsipan internal		93.02	Rp.300.000.000,-	
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan		10 pengguna	Rp.100.000.000	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat		10 pengguna	Rp.100.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					Kabupaten/Kota melalui JIKN	Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp.200.000.000	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp.200.000.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penambahan Khasanah Arsip Statis pada Depo Arsip	Kota Bekasi	10%	Rp.200.000.000	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penambahan Khasanah Arsip Statis pada Depo Arsip	Kota Bekasi	10%	Rp.200.000.000	
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip keluarga yang dienkapsulasi		70 Arsip	Rp.200.000.000	1	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip keluarga yang dienkapsulasi		70 Arsip	Rp.200.000.000	
1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana		50 Arsip	Rp.200.000.000	1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana		50 Arsip	Rp.200.000.000	
					Rp. 18.087.247.990						Rp. 18.087.247.99	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan/Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026 disampaikan usulan kegiatan dari pokok pikiran dewan dan aspirasi masyarakat yang ditujukan ke Disarpusda Kota Bekasi. Berikut usulan kegiatan dari aspirasi masyarakat yang ditujukan ke Disarpusda :

ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN
1784698	09-01-2025	SAKUM NUGRAHA, SE	Pengadaan Perpustakaan Mini (Micro Library) dan kelengkapannya	Perpustakaan Mini "Rak Buku, Meja, Sofa, Meja Komputer, Kursi, TV, 200 Judul Buku"	Kecamatan Jatiasih Jalan Swatantra IV Nomor 2 RT.001 RW.004, Kota Bekasi	Jatiasih	Jatiasih
1899070	17-01-2025	Agus Budiyanto, SE	Pengadaan Sarana dan prasarana perpustakaan Masyarakat	Belum adanya Perpustakaan / taman Baca untuk warga Kelurahan Jatiraden	RT.001 RW.006 jatiraden, Kota Bekasi	Jatisampurna	Jatiraden

Sumber : Data diperoleh dari SIPD RI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISARPUSDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Urusan Perpustakaan

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Urusan Perpustakaan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI di Jakarta Tanggal 23 April 2024, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI menyampaikan Konsep Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2026-2029 dalam Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2026-2029 mengacu pada Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perpustakaan yakni Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi serta mengacu pada 3 (arah) arah kebijakan Perpustakaan Nasional yakni: Penguatan budaya baca dan literasi, pengarus-utamaan naskah kuno nusantara, standardisasi dan pembinaan perpustakaan, serta adanya dukungan penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu.

Tiga Isu utama yang menjadi arah kebijakan Perpustakaan Nasional ini diharapkan mampu memberi fokus bagi Pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga perpustakaan lainnya dalam menyusun program dan kegiatannya dalam rangka mengatasi berbagai isu permasalahan literasi.

Urusan Kearsipan

Dalam rancangan RPJMN 2026-2029 menyebutkan 8 Misi Asta Cita atau Prioritas Nasional salah satunya yaitu “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”. Arah Kebijakan Rancangan RKP 2026 untuk menyelesaikan prioritas nasional melalui kegiatan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dengan pengembangan budaya tertib arsip dan perluasan layanan kearsipan untuk publik. Dalam rancangan Renstra ANRI menyebutkan sasaran strategis nya sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kearsipan nasional yang tertib
- 2) Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya

- 3) Meningkatnya transformasi digital untuk pelayanan informasi kearsipan yang prima dan memiliki jangkauan luas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disarpusda Tahun 2026

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi yaitu “Meningkatnya Budaya Membaca Masyarakat dan Mutu Kearsipan”.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan” dengan indikator sasaran “Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip” dan “Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi” dengan indicator sasaran “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi”

Arah kebijakan yang akan dilakukan Disarpusda Tahun 2026 adalah

a. Urusan kearsipan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menentukan strategi-strategi terkait urusan kearsipan yang meliputi:

- (1) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan;
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;
- (3) Penerapan sistem informasi kearsipan dinamis (SRIKANDI);
- (4) Penerapan sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan
- (5) Pelayanan kearsipan berbasis teknologi informasi.

Sehingga Dinas Arsip dan Perpustakaan menentukan arah kebijakan dalam urusan kearsipan dengan :

- 1) Melakukan peningkatan kompetensi pengolahan arsip pada sumber daya manusia pengelola kearsipan/arsiparis;
- 2) Penyediaan sarana prasarana penyimpanan fisik arsip baik di lembaga kearsipan daerah/Dinas Arsip dan Perpustakaan maupun perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- 3) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan arsip berbasis teknologi informasi dengan cara digitalisasi arsip, yang pada akhirnya terjadi integrasi sistem informasi kearsipan dinamis (SRIKANDI) perangkat daerah, sistem kearsipan statis (SIKS) pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

b. Urusan Perpustakaan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menentukan arah kebijakan dan strategi terkait urusan perpustakaan yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui ketersediaan akses terhadap informasi terapan dan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui:
 - a. Memaksimalkan Gedung Perpustakaan Kota Bekasi menjadi nyaman untuk pemustaka;
 - b. Meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan;
 - c. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan;
 - d. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Membangun resource sharing antar perpustakaan di Kota Bekasi
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pustakawan;
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi pustakawan;
2. Pembudayaan kegemaran membaca melalui tiga pilar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, melalui:
 - a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat serta sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah
 - c. Memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan layanan;
 - d. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;
 - e. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan berbagai komunitas dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;

Berikut Tujuan, Sasaran, dan Target yang hendak dicapai dalam Disarpusda Kota Bekasi tahun 2026.

Tabel 3.2.1

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator, dan Target Disarpusda
Kota Bekasi Tahun 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2026
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan mutu kearsipan		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	77.12
		Indeks Pengawasan Kearsipan	85.36
	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59.56
	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	93.2

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Urusan Kearsipan Tahun 2026

Program Pengelolaan Arsip

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
- Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Urusan Perpustakaan Tahun 2026

Program Pembinaan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISARPUSDA

Pada tahun 2026 Disarpusda Kota Bekasi akan melaksanakan 4 (empat) program, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan. Berikut program yang dilaksanakan tahun 2026:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pengelolaan Arsip; dan
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Indikator kinerja Program (*outcome*) tersebut antara lain:

1. Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:
 - a. Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran;
 - b. Persentase capaian kinerja keuangan penunjang urusan;
 - c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah; dan
 - d. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel;

Indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan yaitu Persentase Penambahan Perpustakaan yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP);

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Arsip secara Tertib.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
- a. Indikator kinerja Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip yaitu Penambahan Khasanah Arsip Statis pada Depo Arsip.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:

- Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

Adapun total pendanaannya untuk program dan kegiatan Disarpusda Kota Bekasi tahun 2026 adalah sebesar Rp 18.087.247.990,- dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Bekasi.

Berikut rincian program dan kegiatan Disarpusda Kota Bekasi disertai indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2026 berikut pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
I	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			Rp16.987.247.990	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
I	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Rp15.067.149.990	
A	2	23	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Dokumen	Rp165.000.000	
1	2	23	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp150.000.000	Sekretariat
2	2	23	01	2	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp15.000.000	Sekretariat
B	2	23	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	Rp12.299.203.000	
3	2	23	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.232 orang/bulan	Rp12.274.203.000	Sekretariat
4	2	23	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp5.000.000	Sekretariat

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
5	2	23	01	2	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Rp5.000.000	Sekretariat
6	2	23	01	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	Rp15.000.000	Sekretariat
C	2	23	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	Rp125.000.000	
7	2	23	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	Rp125.000.000	Sekretariat
D	2	23	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Laporan	Rp665.000.000	
8	2	23	01	2	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp40.000.000	Sekretariat
9	2	23	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Rp30.000.000	Sekretariat
10	2	23	01	2	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp250.000.000	Sekretariat
11	2	23	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp50.000.000	Sekretariat
12	2	23	01	2	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Rp50.000.000	Sekretariat
13	2	23	01	2	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	Rp15.000.000	Sekretariat

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
14	2	23	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp200.000.000	Sekretariat
15	2	23	01	2	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Rp30.000.000	Sekretariat
E	2	23	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	Rp350.000.000	
16	2	23	01	2	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	Rp350.000.000	Sekretariat
F	2	23	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	4 Laporan	Rp762.946.990	
17	2	23	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp284.000.000	Sekretariat
18	2	23	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp478.946.990	Sekretariat
G	2	23	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	Rp700.000.000	
19	2	23	01	2	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	Rp230.000.000	Sekretariat
20	2	23	01	2	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Rp200.000.000	Sekretariat
21	2	23	01	2	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	164 unit	Rp120.000.000	Sekretariat

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
22	2	23	01	2	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp150.000.000	Sekretariat
II	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Penambahan Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10%	Rp1.920.098.000	
H	2	23	02	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemerataan Layanan Perpustakaan	739 Perpustakaan	Rp1.091.354.000	
23	2	23	02	2		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	Rp 150.000.000	BID PKM
24	2	23	02	2	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	Rp 100.000.000	Bidang PKPKBP
25	2	23	02	2	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum danKhusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dankhusus yang dibina sesuaikewenangan Kabupaten/Kota dalammewujudkan Standar NasionalPerpustakaan	1 Perpustakaan	Rp 70.000.000	BID PKM
26	2	23	02	2	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	6000 eksemplar	Rp 101.714.000	Bidang PKPKBP
27	2	23	02	2	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 orang	Rp 150.000.000	BID PKM

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
28	2	23	02	2	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	Rp 200.000.000	BID PKM
29	2	23	02	2	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1707 Eksemplar	Rp 170.100.000	Bidang PKPKBP
30	2	23	02	2	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	Rp 149.540.000	Bidang PKPKBP
I	2	23	02	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Masyarakat Rata-Rata perhari	1645 orang	Rp 828.744.000	
31	2	23	02	2	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	14 orang	Rp 200.000.000	BID PKM
32	2	23	02	2	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	Rp 150.000.000	Bidang PKPKBP
33	2	23	02	2	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan	Rp 278.744.000	Bidang PKPKBP
34	2	23	02	2	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	3 Lokus	Rp 200.000.000	BID PKM
II	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			Rp 1.100.000.000	

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
III	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	59.09%	Rp 900.000.000	
J	2	24	02	2		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis di Perangkat Daerah pada Audit Sistem Kearsipan Interna	36.94 Nilai	Rp 500.000.000	
35	2	24	02	2	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 150.000.000	BID PIK
36	2	24	02	2	0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	12 Lembaga	Rp 250.000.000	BID KEARSIPAN
37	2	24	02	2	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	44 Instansi	Rp 100.000.000	BID KEARSIPAN
K	2	24	02	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai pada Aspek Pengelolaan Arsip Statis pada Audit Sistem Kearsipan Internal	24.88 Nilai	Rp 100.000.000	
38	2	24	02	2	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 arsip	Rp 100.000.000	BID KEARSIPAN
L	2	24	02	2		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Audit Sistem Kearsipan Internal	93.02 Nilai	Rp 300.000.000	
39	2	24	02	2	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 pengguna	Rp 100.000.000	BID PIK
40	2	24	02	2	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 200.000.000	BID PIK

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SESUDAH		BIDANG PENANGGUNG JAWAB
								TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2					3	4	5	6	7
IV	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	10%	Rp 200.000.000	
M	2	24	03	2		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Keluarga yang dienkapsulasi	70 Arsip	Rp 200.000.000	
41	2	24	03	2	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 arsip	Rp 200.000.000	BID KEARSIPAN
TOTAL									Rp 18.087.247.990	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perpustakaan dan kearsipan.

Proses penyusunan Renja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Renja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Adapun kaidah pelaksanaan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Disarpusda Kota Bekasi dengan Sekretaris Disarpusda Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bidang, subbidang dan subbagian pada Disarpusda Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);

5. Agar Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Disarpusda Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026, baik kepada seluruh komponen Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bidang;
 - b. Kepala Disarpusda Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala bidang melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja bidang periode sebelumnya;
 - d. Kepala Disarpusda Kota Bekasi menyusun evaluasi Renja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.

Jika anggaran dinas arsip dan perpustakaan tidak mencukupi, beberapa catatan penting dan langkah antisipasi dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Catatan Penting

1. Prioritas Kegiatan: Identifikasi kegiatan dan proyek yang paling penting dan mendesak. Fokuskan anggaran yang ada pada prioritas ini untuk memastikan fungsi inti tetap berjalan.
2. Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya yang efisien sangat penting. Ini termasuk penggunaan yang bijaksana dari anggaran yang ada serta pengelolaan staf dan fasilitas secara optimal.
3. Dampak terhadap Layanan: Pertimbangkan dampak kekurangan anggaran terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk

pengurangan jam operasional, penundaan program, atau pengurangan akses ke koleksi dan arsip.

4. Pemeliharaan Infrastruktur: Pastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang ada tetap terjaga dengan baik, meskipun anggaran terbatas. Pemeliharaan preventif dapat membantu menghindari biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari.

Antisipasi dan Langkah-Langkah

- 1) Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran: Buat rencana anggaran yang realistis dan fleksibel, dengan skenario berbeda untuk berbagai tingkat pendanaan. Ini akan membantu dalam menyesuaikan prioritas dan alokasi sumber daya sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- 2) Penggalangan Dana: Cari sumber pendanaan tambahan melalui hibah, sumbangan, atau kerjasama dengan sektor swasta. Program sponsorship atau kemitraan dapat membantu mendukung kegiatan tertentu.
- 3) Efisiensi Operasional: Implementasikan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, optimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional dan tenaga kerja.
- 4) Prioritaskan Digitalisasi: Investasikan dalam digitalisasi arsip dan perpustakaan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fisik dan memungkinkan akses yang lebih luas dengan biaya lebih rendah.
- 5) Kolaborasi dan Jaringan: Bangun kemitraan dengan lembaga lain, termasuk lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi non-profit, untuk berbagi sumber daya dan mendukung kegiatan bersama.
- 6) Penataan Ulang: Tinjau struktur organisasi dan proses kerja untuk menemukan area yang bisa dioptimalkan atau disederhanakan. Pengaturan ulang prioritas proyek dan kegiatan juga bisa membantu.
- 7) Keterlibatan Komunitas: Libatkan masyarakat dalam kegiatan sukarela atau program pengumpulan dana untuk mendukung proyek-proyek penting.
- 8) Komunikasi Transparan: Jaga komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan, termasuk publik dan pihak terkait, mengenai tantangan anggaran dan dampaknya. Transparansi ini dapat membantu memperoleh dukungan dan pemahaman dari berbagai pihak.

- 9) Evaluasi dan Penyesuaian: Lakukan evaluasi berkala terhadap pengeluaran dan hasil kegiatan. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi dapat membantu dalam mengelola anggaran yang terbatas secara lebih efektif.

Dengan pendekatan yang tepat, bahkan dengan anggaran yang terbatas, Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat tetap memberikan layanan yang penting bagi masyarakat sambil mengelola sumber daya secara efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2026. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan.

Bekasi, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kota Bekasi,



Ir. Lusiana, M.Si

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19680920 199503 2 002